

PENGELOLAAN USAHA SIMPAN PINJAM

Rara Silkfan, M.Ak

Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru
Jl. Kuau No.01 Sukajadi Pekanbaru

Email : rarasilkfan.lecture@gmail.com

Abstrak. Pada dasarnya Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian. Dari pengelolaan Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa Dian Koto Bandur Picak berdasarkan data yang ditemukan banyak pemanfaat yang melakukan penunggakan dalam pembayaran kredit, dan banyak masyarakat yang menyalah gunakan pinjaman untuk kepentingan pribadi (konsumsi) bukan produksi. Hal ini dapat dilihat dari data tahun 2017-2019 jumlah pemanfaat yang melakukan penunggakan berjumlah 28 orang artinya pengelolaan Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa Dian Koto Bandur Picak tidak sesuai dengan program BUMDes. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui pengelolaan, faktor pendukung, dan penghambat dalam pengelolaan Usaha Simpan Pinjam pada BUMDes Dian Koto Bandur Picak merujuk pada buku pengelolaan BUMDes dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini yang menjadi indikatornya adalah kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan sustainabel berdasarkan Peraturan Menteri Desa No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes, sedangkan informan dalam penelitian ini yaitu, Kepala Desa Bandur Picak, Ketua BUMDes Dian Koto, Sekretaris BUMDes Dian Koto, Bendahara BUMDes Dian Koto, Staf Analisis BUMDes Dian Koto, dan Masyarakat. Hasil penelitian tentang pengelolaan BUMDes Dian Koto bahwa pengurus BUMDes sudah mengikuti aturan yaitu menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, akuntabel, transparansi, dan sustainable. Namun dalam pengelolaan BUMDes banyak masyarakat yang melakukan penunggakan pembayaran kredit dan tidak memanfaatkan pinjamannya untuk membuka usaha, kebanyakan masyarakat menggunakan pinjaman untuk kebutuhan konsumsi bukan produksi.

Kata kunci : Dampak; Pandemi Covid19; UMKM

Abstract. Basically, the management of the Savings and Loan Business at the Village-Owned Business Entity is in order to improve the economy. From the management of the Savings and Loan Business at the Dian Koto Bandur Picak Village-Owned Business Entity based on the data found, many beneficiaries are in arrears in credit payments, and many people misuse loans for personal use (consumption) not production. This can be seen from the data for 2017-2019 the number of users who are in arrears is 28 people, meaning that the management of the Savings and Loan Business at the Dian Koto Bandur Picak Village-Owned

Business Entity is not in accordance with the BUMDes program. The purpose of this study, to determine the management, supporting factors, and obstacles in the management of the Savings and Loan Business at BUMDes Dian Koto Bandur Picak referring to the BUMDes management book using a qualitative descriptive approach. In this study, the indicators are cooperative, participatory, emancipatory, transparent, accountable, and sustainable based on Village Minister Regulation No. 4 of 2015 concerning Establishment, Management, Management, and Dissolution of BUMDes, while the informants in this study are, Bandur Picak Village Head, Chairman of BUMDes Dian Koto, Secretary of BUMDes Dian Koto, Treasurer of BUMDes Dian Koto, Analysis Staff of BUMDes Dian Koto, and the Community. The results of research on the management of BUMDes Dian Koto that the BUMDes management has followed the rules, namely using the principles of cooperative, participatory, emancipative, accountable, transparency, and sustainable. However, in the management of BUMDes, there are many people who make delinquent credit payments and do not utilize their loans to open a business, most people use loans for consumption needs not production.

Keywords: Impact; Covid19 Pandemic; UMKM

A. PENDAHULUAN

Berpedoman dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tersebut Pemerintah provinsi Riau mempunyai hak dan kewajiban untuk mengurus dan mengatur daerahnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, guna mensejahterakan masyarakat Riau. Dalam implementasi Program Pemberdayaan Desa yang diterapkan oleh pemerintah Riau salah satunya adalah Program Usaha.

Ekonomi Desa Simpan Pinjam pada Badan Usaha Milik Desa, program ini merupakan pemberian dana pinjaman kepada masyarakat menengah kebawah. Dana ini berasal dari dana pusat yang diperuntukkan bagi provinsi Riau. Usaha simpan pinjam pada BUMDes, khususnya pada BUMDes Dian Koto Bandur Picak salah satu program kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Proses kerjasama adalah salah satu hal yang sangat mendasari untuk mencapai sebuah tujuan, sehingga proses kerjasama tidak berjalan dengan baik maka tujuan dari sebuah rencana tidak akan efektif dan efisien. Hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa proses kerja sama dimulai dari pihak Badan Usaha Milik Desa, dimana BUMDes Dian Koto Bandur Picak melakukan persiapan dokumen pendukung untuk kerjasama dengan masyarakat.

Memperhatikan masalah yang terdapat pada latar belakang diatas maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian tentang : "Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam (Studi pada Badan Usaha Milik Desa Dian Koto Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar)"

1. Pengelolaan

Menurut Handoko "Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan suatu kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada suatu yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan". Menurut Handayaniingrat "Pengelolaan juga bisa diartikan penyelenggaraan suatu kegiatan"

Pada prinsipnya pengelolaan keuangan publik oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan keuangan publik sebagaimana dimaksud adalah mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban.

2. Keuangan Daerah

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu kepada undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah

3. Otonomi Daerah

Sumber pendapatan desa sebagaimana tersebut diatur dan dikelola dalam Anggaran dan Pendapatan Desa (APBD) yang setiap tahunnya ditetapkan oleh kepala desa bersama BPD yang kemudian dituangkan dalam peraturan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

4. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan juga memiliki beberapa defenisi yang dapat dilihat dari tujuan proses, dan cara-cara pemberdayaan.

- a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.
- b. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupan.
- c. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan sruktur sosial.
- d. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi yang berkembang pesat diarahkan agar kehidupan mampu menguasai (berkuasa).

5. Usaha Ekonomi Simpan Pinjam

Dana usaha Desa adalah sejumlah dana yang ditempatkan pada rekening desa dan hanya didapatkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara kelompok atau perorangan melalui lembaga usaha ekonomi simpan pinjam, program pemberdayaan desa sektor usaha ekonomi simpan pinjam merupakan lembaga pedesaan yang bergerak dibidang keuangan untuk menunjang usaha ekonomi simpan pinjam produktif didesa yang bersangkutan yang berfungsi sebagai lembaga menyalurkan dana melalui mekanisme penyaluran kredit dan penarikan dana dari penyaluran kredit tersebut

6. **Badan Usaha Milik Desa**
Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan menyediakan jasa usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa
7. **Pandangan Syariat Islam Tentang Simpan Pinjam**
Manusia hidup erat hubungannya dengan muamalah dengan individu yang lain. Masing-masing berusaha dengan berbagai upaya, untuk menciptakan suatu kondisi yang memudahkan keberlangsungan hidupnya. Tentunya didalamnya tidak lepas dari hubungan timbal balik, tolong menolong diantara sesama, lebih terkhusus lagi dalam hal pinjam meminjam barang. Sehingga manusia sangat mudah mendapatkan barang yang ia inginkan dan tidak harus membelinya. Karena islam telah mengajarkan umat manusia untuk berbuat baik dan tolong menolong

B. METODE

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Lexy J.Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah

b. Waktu dan Lokasi Penelitian

1) Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada BUMDes Dian Koto Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

2) Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan September-Desember Tahun 2021.

c. Informan Penelitian

Menurut Burhan Bugin, informan penelitian adalah subyek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Lexy J. Moleong menyatakan bahwa informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan di teliti. Informan penelitian yaitu sumber dari mana data diperoleh, penentuan informan pada penelitian kualitatif dilakukan secara *purposive*, yaitu ditentukan dengan menyesuaikan pada tujuan tertentu. Dalam penelitian ini untuk menentukan informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*

d. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sasaran secara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal objektif, valid, dan reliable tentang suatu hal (variabel tertentu). Adapun objek penelitian yaitu: pengelolaan usaha simpan pinjam pada BUMDes Dian Koto Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah awal yang harus ditempuh dalam sebuah penelitian dengan tujuan memperoleh data yang dibutuhkan dengan tepat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi

f. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*coclusion drawing* atau *verification*), ketiga langkah saling berinteraksi tidak ada batas yang memisahkan antara unsur-unsur pada proses penelitian, data dalam suatu siklus yang sistematis

g. Pengajian Keabsahan Data

Keabsahan data adalah pengujian data yang didapat dalam suatu penelitian untuk mengetahui apakah data itu dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Menurut Zulfadrial keabsahan data merupakan padanan dari konsep kesahihan (*validitas*) dan keandalan (*reliabilitas*) menurut versi penelitian kuantitatif dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kereteria, dan paradigmanya sendiri. Creswell dalam Syahri Ramadhan menyatakan bahwa uji keabsahan data dapat dilakukan dengan uji validitas dan reliabilitas. Umar Siddiq dan Moh. Miftachul Choiri juga menyatakan bahwa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reabilitas. Berikut adalah uji validitas dan reabilitas yang dilakukan dalam penelitian ini

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Gambaran Umum Desa Bandur Picak Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar

1. Sejarah Desa Bandur Picak

Desa Bandur Picak adalah suatu desa yang merupakan suatu wilayah Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Desa Bandur picak ini merupakan salah satu Desa yang merasakan dampak dari PLTA Koto Panjang, Desa Bandur Picak dulunya hanya merupakan suatu lingkungan yang dipimpin oleh seorang ketua RT yang merupakan wilayah dari Desa Sibiruang.

Pada tahun 1996 para tokoh masyarakat Ninik Mamak dan masyarakat lainnya mengadakan musyawarah yang menciptakan suatu keputusan yaitu untuk membangun sebuah desa. Para tokoh masyarakat berjuang dengan sungguh-sungguh selama lebih kurang 2 tahun, namun perjuangan mereka tidaklah sia-sia. Pada tahun 1998 perjuangan telah membuat hasil yang memuaskan, pemerintah daerah Provinsi Riau dan pemerintah pusat menyetujui Bandur Picak menjadi sebuah Desa yang

dipimpin oleh seorang kepala Desa yang ditunjuk langsung oleh masyarakat yaitu bapak Syafril Arif.

2. Demografi Desa Bandur Picak

Demografi Desa Bandur Picak terletak didalam wilayah Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pendalian
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tandun
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sibiruang
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kapur IX Provinsi Sumatera Barat.

Luas wilayah desa Bandur Picak adalah 20500 KM² dimana 45% berupa daratan yang bertopografi berbukit-bukit, dan 55% daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian seperti: tanaman Palawija, Perkebunan Gambir, Jeruk Kakao, Karet dan Kelapa Sawit. Iklim desa Bandur picak, Sebagaimana desa-desa lain diwilayah Indonesia mempunyai iklim penghujan, pancaroba, dan kemarau, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar

3. Pembagian Wilayah Desa Bandur Picak

Pembagian wilayah desa Bandur Picak dibagi menjadi IV (empat) dusun, pada tahun 2013 dusun III dibagi menjadi dua dusun yaitu dusun V, sehingga wilayah Desa Bandur Picak menjadi V (lima) dusun. Sementara pusat desa berada di dusun IV (empat), setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang dibantu oleh Ketua RW dan RT

4. Visi dan Misi Bandur Picak

a. Visi Desa Bandur picak

Mewujudkan masyarakat yang beriman, bermartabat dan meningkatkan kesejahteraan dengan mengembangkan potensi sumber daya

b. Misi Desa Bandur Picak

Adapun Misi Desa Bandur Picak adalah :

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan dalam mewujudkan masyarakat beriman dan bertaqwa.
- 2) Meningkatkan dan menata pembangunan infrastruktur yang merata, berkualitas dan berkelanjutan.
- 3) Menumbuh kembangkan kepedulian sosial dan kebersamaan dalam segala bidang.
- 4) Meningkatkan pelayanan yang profesional, bermutu dan mempermudah pelayanan kesehatan masyarakat.
- 5) Mengupayakan peningkatan akses perekonomian dan pertanian masyarakat.
- 6) Menunjang pengadaan permodalan untuk usaha kecil dan menengah serta memperluas lapangan kerja dan manajemen usaha masyarakat.
- 7) Mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai leluhur, seni dan budaya

b) Kooperatif

1. Pemerintah Desa dengan BUMDes

Pemerintah desa dengan BUMDes dalam pengelolaan Usaha Simpan Pinjam pada BUMDes Dian Koto Bandur Picak merupakan pihak yang saling berkaitan dengan meningkatkan dan mengembangkan BUMDes. Apapun yang dilakukan oleh pihak BUMDes terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah desa. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terkait prinsip kooperatif kepada bapak Rais Adli, S.E.Sy. selaku Kepala Desa Bandur Picak yang mengatakan bahwa:

"BUMDes adalah badan usaha yang dikelola oleh desa, hubungan BUMDes dengan Desa itu bisa dikatakan satu atap satu rumah, apa yang dilakukan oleh BUMDes mendapatkan arahan dari Kepala Desa, BUMDes tidak bisa membuat keputusan sendiri dalam pengelolaan usaha simpan pinjam tersebut kecuali sudah mendapatkan arahan dan perintah dari Kepala Desa".

Hal yang sama juga dijelaskan oleh bapak Fakhrol Amri, S.Pd selaku Ketua BUMDes Dian Koto Bandur Picak, mengatakan :

"Kami dari pihak BUMDes Dian Koto dalam pengelolaannya tidak lepas dari Pemerintah Desa, apapun yang dilakukan atau yang kami laksanakan dalam pengelolaan BUMDes, Pemerintah Desa harus diberi tahu. Dalam pengelolaan ini prinsip kooperatif dengan pemerintah desa harus diterapkan. Selama ini dalam pengelolaan BUMDes Dian Koto kami selalu berdiskusi dulu dengan Kepala Desa".

Dari tanggapan wawancara yang peneliti lakukan diatas dapat diketahui bahwa pengelolaan usaha simpan pinjam pada BUMDes Dian Koto Bandur Picak kerjasama antara pemerintah desa dengan pihak BUMDes dalam membuat suatu keputusan ataupun suatu kebijakan yang dilaksanakan oleh BUMDes, selalu mendapatkan arahan dari Pemerintah Desa, yang akan memberikan dampak positif demi keberlanjutan program BUMDes. Saran dan pendapat dari Kepala Desa sangat penting dalam pengelolaan BUMDes

2. BUMDes dengan Masyarakat

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Fakhrol Amri, S.Pd selaku Ketua BUMDes Dian Koto, mengatakan :

"Sesuai dengan aturan dalam pengelolaan usaha simpan pinjam BUMDes dengan masyarakat terlebih dahulu melakukan sosialisasi. Sosialisasi kepada masyarakat dapat dilakukan oleh pemerintah desa, BPD, Kader pemberdayaan masyarakat desa. Kerjasama yang dilakukan BUMDes dengan masyarakat bisa menabung pada BUMDes".

Hal ini juga didukung oleh pendapat bapak Suhailis salah seorang pemanfaat dalam pengelolaan usaha simpan pinjam pada BUMDes Dian Koto yang mengatakan:

"Seperti yang saya alami, pendapat saya tentang kepengurusan BUMDes Dian Koto ini baik karena pada awal sebelum saya melakukan pinjaman pihak BUMDes melakukan sosialisasi terlebih dahulu tentang BUMDes tersebut, dari sosialisasi inilah saya paham akan BUMDes dan mengetahui kewajiban saya sebagai pemanfaat dalam usaha simpan pinjam pada BUMDes Dian Koto. Selain itu semua pengurus BUMDes Dian Koto

dalam angsuran kredit menerapkan prinsip kooperatif dengan baik kepada saya selaku pemanfaat dari simpan pinjam BUMDes Dian Koto”.

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Fakhrol Amri, S.Pd. dan bapak Suhailis dapat disimpulkan bahwa: “Pengurus BUMDes terlebih dahulu melakukan sosialisasi terkait usaha simpan pinjam pada BUMDes Dian Koto sehingga bapak Suhailis bisa mengetahui kewajiban sebagai pemanfaat dan juga mengetahui tujuan dari simpan pinjam BUMDes tersebut”.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan bapak Ahmad Irwandi, S.IP. sebagai Sekretaris BUMDes Dian Koto Bandur Picak, mengatakan:

“Dalam pengelolaan usaha simpan pinjam pada BUMDes Dian Koto prinsip kooperatif yang saya lakukan sebagai sekretaris adalah mencatat laporan bulanan pemanfaat BUMDes Dian Koto, pencatatan barang masuk dan keluar serta pencatatan syarat masuk dan syarat keluar dalam pengelolaan usaha simpan pinjam pada BUMDes Dian Koto”.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Selvi Etria Nelsi, S.E sebagai Bendahara pada BUMDes Dian Koto Bandur Picak, mengatakan:

“Bentuk kerjasama antara bendahara dengan pemanfaat simpan pinjam BUMDes Dian Koto yaitu sesuai prosedur dalam pengelolaan usaha simpan pinjam, seperti pemanfaat yang ingin melakukan pinjaman, jumlah pinjamannya harus sesuai juga dengan jaminan/anggunan yang mereka punya

3. Masyarakat dengan Pemerintah Desa

Kerjasama antara Pemerintah Desa dengan Masyarakat dalam pengelolaan simpan pinjam pada BUMDes Dian Koto diperjelas oleh Bapak Rais Adli, S.E.Sy sebagai Kepala Desa Bandur Picak, yaitu :

“Dalam pengelolaan usaha simpan pinjam pada BUMDes ini saya selaku Kepala Desa memberikan informasi kepada masyarakat yang terkait dengan pengelolaan usaha simpan pinjam pada BUMDes Dian Koto. Hubungan simpan pinjam itu berurusan dengan Pemerintah Desa, dan Pemerintah Desa berkewajiban memberitahu kepada masyarakat tentang kegunaan dan kemudahan dalam BUMDes”.

Jadi, berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan diatas mengenai indikator kooperatif dalam analisis pengelolaan usaha simpan pinjam pada BUMDes Dian Koto Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, dilihat dari pemerintah Desa dengan BUMDes, BUMDes dengan Masyarakat, Masyarakat dengan Pemerintah Desa dapat disimpulkan bahwa pengurus BUMDes, Pemerintah Desa, Masyarakat dan semua instansi yang terkait sudah melakukan kerjasama yang baik dalam pengelolaan usaha simpan pinjam pada BUMDes Dian Koto Bandur picak.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam pada BUMDes Dian Koto Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar maka dapat peneliti ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dian Koto Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar sudah berjalan cukup baik, dilihat dari indikator kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainabel sudah

- dilaksanakan berdasarkan aturan yang ditetapkan dalam pengelolaan usaha simpan pinjam pada BUMDes Dian Koto Bandur Picak antara Pengurus, Pemerintah Desa, Masyarakat, dan semua elemen yang terkait dengan BUMDes Dian Koto Bandur Picak.
2. Adapun faktor pendukung pengelolaan usaha simpan pinjam pada BUMDes Dian Koto Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar adalah:
 - a. Kerjasama yang baik antara Pemerintah Desa dengan BUMDes, Pemerintah Desa dengan Masyarakat, dan Masyarakat dengan BUMDes.
 - b. Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
 - c. Sosialisasi untuk masyarakat.
 - d. Partisipasi dan tindakan proaktif masyarakat.
 - e. Memberikan bonus kepada masyarakat (pemanfaat).
 3. Adapun faktor penghambat pengelolaan usaha simpan pinjam pada BUMDes Dian Koto Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar adalah :
 - a. Masih banyak masyarakat yang melakukan penunggakan pembayaran kredit setiap bulannya.
 - b. Masyarakat menyalahgunakan pinjaman untuk kebutuhan konsumsi bukan produksi.
 - c. Dana yang diberikan kepada pemanfaat tidak digunakan sesuai dengan Program BUMDes Dian Koto Bandur Picak.
 - d. Kurangnya pengetahuan pengurus BUMDes Dian Koto Bandur Picak dalam pengelolaan BUMDes karena tidak diberikan pembinaan dari kabupaten.

REFERENSI

- Anwas, 2014. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*, Bandung: Alfabeta
- Atep Adya Brata, 2004. *Kekuasaan Pengolaan Keuangan Negara/Daerah*, Jakarta: PT Elek Media Komputindo
- Bugin Burhan, 2007. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2011. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 105
- Domai Tjahjanulin, 2010. *Manajemen Keuangan Publik*, Malang: Universitas Brawijaya
- Handyaningrat Soewarno, 1997. *Pengantar Studi Administrasi dan Management*, Jakarta: Gunung Agung
- Handoko, 1997. *Manajemen Personalialia Dan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- John W. Creswell. 2013. *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Lexy J. Moleong, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Musfiqon, 2012. *Panduan Lengkap Mentodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya
- Nana Shyaodih Sukmadinata, 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Paizaludin dan Ermalinda, 2013. *Penelitian Tindakan Kelas*, Bandung: Alfabeta
- Rahardjo Adisasmata, 2011. *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu

- Ramadhan Syahri. 2105. *Evaluasi Pendidikan Agama Islam di Madrasah Tsanawiyah Ibnu Qoyyim Putri Yogyakarta (Perspektif Prinsip-prinsip Belajar Utsman Najati)*, Tesis. Program Studi Magister Studi Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Sedarmayanti, 2005. *Good Governance*. Bandung: Mandar Maju
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta
- Suharto Edi, 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT Refika Aditama
- Sulistiyani, 2004. *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gaya Media
- Theresia, Aprilia, dkk. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung: Alfabeta
- Uhar Suharsaputra, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan tindakan*, Bandung: Refika Aditama
- Umar Siddiq dan Moh. Miftachul Choiri, 2019. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, Ponorogo: Nata Karya
- UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Widjaja, 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, Dan Utuh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Winarni, Tri, 1998. *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif Dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa Menyongsong Abad 21 Menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat*, Yogyakarta: Aditya Media
- Yatim Riyanto. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Surabaya: SIC
- Yusuf Muri. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenada Media Group
- Zuldafrial. 2012. *Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Yuma Pustaka